

## PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAN POLITIK ANGGARAN

Fahmi<sup>1</sup>, Laili Nurfadillah<sup>2</sup>, Raihan Ardi Rifky<sup>3</sup>, Epita<sup>4</sup>, Alfin Saputra<sup>5</sup>, M. Rafi Alghifari<sup>6</sup>

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang<sup>1,2,3,4,5,6</sup>

e-mail: [fahmi\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:fahmi_uin@radenfatah.ac.id) [nurfadilahlaily@gmail.com](mailto:nurfadilahlaily@gmail.com) [raihanardi1705@gmail.com](mailto:raihanardi1705@gmail.com)  
[epitamahidin4@gmail.com](mailto:epitamahidin4@gmail.com) [alfinsaputra286@gmail.com](mailto:alfinsaputra286@gmail.com) [ralghifari955@gmail.com](mailto:ralghifari955@gmail.com)

Diterima: 15/5/2026; Direvisi: 20/4/2026; Diterbitkan: 25/5/2026

### ABSTRAK

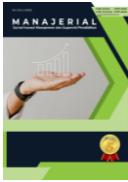
Penelitian ini, menggunakan metode studi pustaka, mengkaji pembiayaan pendidikan dan politik anggaran dalam menentukan arah kebijakan pendidikan di Indonesia. Pembiayaan pendidikan merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang bertujuan untuk menjamin tersedianya sumber daya dalam mendukung proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Sementara itu, politik anggaran berperan dalam menentukan prioritas alokasi dana yang dipengaruhi oleh kepentingan berbagai aktor kebijakan. Analisis pustaka menunjukkan adanya hubungan yang erat antara pembiayaan pendidikan dan politik anggaran, di mana kebijakan anggaran tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan kepentingan politik dalam distribusi sumber daya. Pembiayaan pendidikan diidentifikasi sebagai faktor strategis dalam peningkatan mutu pendidikan melalui penyediaan sarana prasarana, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, dan pemerataan akses pendidikan. Namun, tantangan seperti ketimpangan distribusi dana, intervensi politik, serta kurangnya efisiensi penggunaan anggaran masih menjadi hambatan dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan yang dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan nyata, serta didukung oleh politik anggaran yang berpihak pada kepentingan publik, merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Pembiayaan Pendidikan, Politik Anggaran, Kebijakan Pendidikan, Kualitas Pendidikan*

### ABSTRACT

This study, using a literature study method, examines education financing and budget politics in determining the direction of education policy in Indonesia. Education financing is an essential component in the implementation of education, aimed at ensuring the availability of resources to support effective and quality learning processes. Meanwhile, budget politics plays a role in determining funding allocation priorities influenced by the interests of various policy actors. Literature analysis shows a close relationship between education financing and budget politics, where budget policies are not only technical in nature but also reflect political interests in the distribution of resources. Education financing is identified as a strategic factor in improving the quality of education through the provision of infrastructure, enhancement of teacher competence, and equal access to education. However, challenges such as unequal fund distribution, political intervention, and inefficiency in budget utilization remain obstacles in achieving quality education. It is concluded that education financing managed transparently, accountably, and oriented toward real needs, supported by budget politics that prioritizes public interests, is key to improving the quality and equity of education in Indonesia.

**Keywords:** *Education Financing, Budget Politics, Education Policy, Quality of Education*

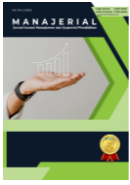


## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor paling utama dalam menyokong roda pembangunan suatu bangsa, karena melalui proses edukasi yang terstruktur dapat dibentuk sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki daya saing tinggi, serta mampu menjawab tantangan perkembangan zaman yang kian dinamis. Dalam kerangka pembangunan nasional, penyelenggaraan pendidikan tidak lagi sekadar dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan dasar warga negara, melainkan telah ditempatkan sebagai bentuk investasi jangka panjang yang sangat menentukan arah kemajuan ekonomi dan peradaban suatu negara di masa depan. Oleh karena itu, demi mewujudkan tata kelola kependidikan yang bermutu tinggi dan inklusif, diperlukan dukungan yang kuat dari berbagai aspek manajerial, di mana salah satu komponen yang paling krusial dan mendasar adalah ketersediaan sistem pembiayaan yang memadai dan stabil. Pendanaan yang sehat menjadi bahan bakar utama bagi institusi kependidikan untuk merancang program jangka panjang yang berorientasi pada pencapaian standar mutu internasional demi mencetak generasi emas yang unggul (Harbes et al., 2024; Himmawan et al., 2023; Nover et al., 2025).

Sistem pembiayaan kependidikan memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin terselenggaranya seluruh proses instruksional di lembaga formal secara efektif, efisien, serta berkelanjutan dari waktu ke waktu. Tanpa adanya dukungan dana yang mencukupi, berbagai program strategis seperti pengadaan sarana prasarana modern, peningkatan kompetensi profesional tenaga pendidik melalui pelatihan berkala, serta pembaruan kurikulum yang adaptif tidak akan dapat berjalan secara optimal di lapangan. Secara teoretis, alokasi dana kependidikan mencakup akumulasi modal yang dihasilkan dan dibelanjakan secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional harian maupun investasi jangka panjang lembaga. Di Indonesia sendiri, porsi pendanaan ini sebagian besar bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta daerah, dengan payung hukum yang mewajibkan alokasi minimal sebesar 20 persen demi memastikan sektor ini mendapatkan prioritas utama dalam kebijakan fiskal nasional. Penetapan batas minimal ini menjadi bukti komitmen politik regulasi dalam memperkuat fondasi intelektual bangsa agar mampu sejajar dengan negara-negara maju lainnya (Herman & Hayat, 2021; Hutagaol et al., 2022; Ramadani et al., 2021).

Kondisi ideal yang dicita-citakan oleh undang-undang adalah terciptanya distribusi anggaran kependidikan yang merata, tepat sasaran, serta mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat hingga ke daerah pelosok demi mewujudkan keadilan sosial. Namun, realitas objektif yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar dan mengkhawatirkan antara teks regulasi dengan implementasi operasional tata kelola keuangan di berbagai daerah saat ini. Pengelolaan dana masih sering kali dibenturkan pada berbagai tantangan klasik yang pelik, seperti ketimpangan alokasi antardaerah yang mencolok, keterbatasan anggaran daerah, serta rendahnya tingkat efisiensi dalam penggunaan dana operasional sekolah. Banyak wilayah pinggiran yang masih kekurangan fasilitas belajar memadai, sementara wilayah perkotaan menikmati kelimpahan fasilitas digital yang canggih. Jurang pemisah senyatanya ini mengindikasikan adanya disfungsi dalam mekanisme pengawasan dan distribusi anggaran, sehingga esensi dari jaminan alokasi dana minimal dari pemerintah belum sepenuhnya mampu mendongkrak mutu kependidikan secara seragam,



berkeadilan, dan menyeluruh di seluruh pelosok tanah air (Lutfi et al., 2024; Setiawan et al., 2022; Sumpena et al., 2022).

Ketidakselarasan tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dinamika politik anggaran yang terjadi dalam proses penentuan alokasi sumber daya keuangan di tingkat legislatif maupun eksekutif. Anggaran publik pada hakikatnya bukan sekadar dokumen teknis keuangan yang kaku, melainkan sebuah produk kebijakan yang sarat akan benturan berbagai kepentingan kelompok tertentu dalam proses pengambilan keputusan strategis. Permasalahan utama yang kemudian mengemuka di lapangan adalah bagaimana memastikan bahwa kebijakan penganggaran tersebut benar-benar murni berorientasi pada peningkatan kualitas pengajaran, dan bukan sekadar komoditas untuk meraih simpati politik sesaat. Dalam banyak kasus nyata, distribusi dana sering kali meleset dari sasaran prioritas, sehingga gagal menyelesaikan persoalan mendasar seperti kesenjangan akses sekolah, buruknya mutu ruang kelas, serta rendahnya tingkat kesejahteraan tenaga pendidik. Intervensi kepentingan luar ini menyebabkan struktur pembiayaan menjadi kurang fleksibel dan cenderung lambat dalam merespons kebutuhan darurat kependidikan yang membutuhkan penanganan taktis di tingkat akar rumput (Effendy et al., 2024; Pujawardani et al., 2023; Suryana, 2020).

Berangkat dari tumpukan problematika manajerial tersebut, penelitian ini hadir dengan menawarkan nilai kebaruan berupa analisis kritis terhadap mekanisme integrasi antara sistem pembiayaan dan dinamika kebijakan penganggaran publik. Penelitian ini tidak dilaksanakan pada lingkup institusi persekolahan tertentu, sehingga fokus pengamatan diarahkan sepenuhnya pada evaluasi makro kebijakan pendanaan guna menemukan model tata kelola yang bersih dan akuntabel. Inovasi dari kajian ini terletak pada formulasi strategi pengawasan anggaran yang berbasis pada prinsip efisiensi berkeadilan untuk meminimalisir risiko tumpang tindih kepentingan kelompok. Melalui pendekatan deskriptif yang mendalam, studi ini berupaya membedah korelasi erat antarvariabel keuangan negara demi merumuskan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pengambil keputusan. Tujuan akhirnya adalah menyediakan cetak biru sistem pembiayaan yang tidak hanya transparan secara administratif, melainkan juga memiliki keberpihakan yang nyata terhadap peningkatan mutu akademis serta mampu memberikan perlindungan hukum yang paling efektif bagi pengelolaan dana kependidikan nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggabungkan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif untuk menelaah peran pembiayaan pendidikan serta politik anggaran dalam menentukan kualitas dan arah kebijakan instruksional. Jenis kajian deskriptif-analitis ini dipilih untuk mengurai secara mendalam fenomena pengelolaan keuangan dan pertarungan kepentingan para aktor kebijakan pada sektor pendidikan nasional. Ruang lingkup pengumpulan pustaka dibatasi secara terstruktur pada publikasi ilmiah ilmiah terpercaya yang terbit dalam rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2026. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang melakukan pencarian, penelaahan, serta pengolahan data untuk menemukan hubungan kausal antara efisiensi anggaran dengan mutu hasil belajar. Fokus utama dari rancangan penelitian ini adalah menyajikan gambaran menyeluruh tentang realitas sistem pendanaan tanpa melakukan manipulasi variabel ataupun generalisasi populasi secara kuantitatif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berupa data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari literatur terpercaya. Bahan hukum dan rujukan ilmiah tersebut meliputi buku teks manajemen keuangan, jurnal riset orisinal, serta dokumen resmi kebijakan penganggaran negara. Prosedur pengumpulan informasi dilakukan melalui teknik



dokumentasi pustaka yang meliputi langkah pencarian berkas, pemeriksaan keaslian sumber, dan pencatatan informasi esensial mengenai skema bantuan operasional maupun program beasiswa. Setelah data terkumpul, tahapan analisis dikerjakan secara induktif dengan menerapkan model analisis kualitatif terstruktur. Langkah-langkah analisis tersebut meliputi reduksi data untuk menyaring konsep yang relevan, penyajian data secara naratif, serta penarikan simpulan konseptual. Seluruh data numerik yang berkaitan dengan indikator persentase, seperti mandat minimal anggaran 20% dalam undang-undang, ditulis menggunakan angka nyata guna menjamin keaslian pelaporan ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### 1. Konsep Dasar dan Klasifikasi Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan merupakan pilar instrumental yang sangat krusial dalam menjamin penyelenggaraan proses pembelajaran yang bermakna dan bermutu di sekolah. Secara konseptual, pembiayaan ini mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan, pengelolaan, serta pengalokasian sumber daya keuangan demi menopang keberlanjutan layanan edukasi. Komponen biaya secara umum diklasifikasikan ke dalam biaya langsung yang menyentuh aktivitas instruksional di kelas dan biaya tidak langsung yang berbentuk pengorbanan ekonomis siswa selama belajar. Pengeluaran langsung seperti pemenuhan gaji pendidik, pengadaan buku paket, alat tulis, hingga bahan praktikum secara linier berkorelasi positif terhadap peningkatan prestasi belajar peserta didik. Di sisi lain, sekolah juga memerlukan kalkulasi biaya operasional rutin serta biaya investasi modal jangka panjang guna membentuk kapasitas infrastruktur yang kokoh. Oleh karena itu, akuntabilitas finansial dan ketepatan sasaran pengalokasian dana menjadi faktor dominan dalam merealisasikan fungsi efisiensi, kontinuitas operasional, dan pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi sosial ekonomi.

#### 2. Diversifikasi Sumber Pendanaan Pendidikan Nasional

Sumber pendanaan pendidikan di Indonesia bertumpu pada tiga pilar utama yang saling melengkapi sesuai amanat regulasi, yaitu pemerintah, partisipasi masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah bertindak sebagai penyangga dominan melalui komitmen konstitusional dengan mengalokasikan anggaran khusus yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara maupun daerah. Distribusi dana tersebut disalurkan melalui berbagai instrumen strategis seperti bantuan operasional sekolah untuk biaya rutin, dana alokasi khusus fisik untuk rehabilitasi gedung, serta program bantuan tunai bagi siswa miskin demi mencegah angka putus sekolah. Di samping peran negara, peran serta masyarakat dan swadaya komite sekolah tetap dibutuhkan untuk menutupi celah kebutuhan operasional yang belum terdani secara penuh. Pada sektor pendidikan swasta, kemandirian yayasan dalam mengelola uang pangkal dan iuran bulanan turut membantu mengurangi beban finansial pemerintah dalam memperluas daya tampung siswa. Sinergi yang harmonis dari ketiga sumber dana ini sangat menentukan stabilitas fiskal lembaga pendidikan dalam menjaga mutu layanan.

Tabel 1. Jenis Dana Pendidikan

Jenis Dana	Sumber	Fokus Penggunaan
Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)	APBN (Transfer ke Daerah)	Operasional sekolah, gaji guru honorer, pembelian buku & alat peraga
DAK Fisik (Dana Alokasi Khusus)	APBN	Pembangunan/renovasi ruang kelas,



		laboratorium, dan sanitasi
PIP (Program Indonesia Pintar)	APBN	Bantuan tunai langsung ke siswa miskin untuk mencegah putus sekolah
Gaji Pendidik	APBN/APBD	Gaji guru PNS dan dosen yang diangkat pemerintah
Dana Abadi Pendidikan	APBN (LPDP)	Beasiswa pendidikan tinggi dan riset jangka panjang

### 3. Arena Politik Anggaran dalam Kebijakan Pendidikan

Politik anggaran dalam dunia pendidikan merupakan arena perebutan kepentingan dan tawar-menawar strategis yang melibatkan aktor eksekutif, legislatif, serta kelompok masyarakat sipil. Alokasi keuangan bukan sekadar hitungan teknokratis di atas kertas, melainkan perwujudan nyata dari ideologi dan prioritas politik dari pemerintahan yang sedang berkuasa di suatu periode. Tarik-menarik antara rasionalitas efisiensi mutu dengan kepentingan elektoral sering kali mendikte arah kebijakan penganggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah. Fenomena ini terlihat jelas ketika alokasi dana publik digunakan sebagai instrumen populis demi meraup dukungan konstituen tanpa didasari oleh analisis kebutuhan riil sekolah di lapangan. Anggaran bertindak sebagai induk kebijakan karena program inovasi kurikulum maupun peningkatan kompetensi guru tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dukungan pendanaan yang memadai. Dengan demikian, dinamika politik anggaran menjadi jantung dari demokrasi fiskal yang mencerminkan sejauh mana para pembuat kebijakan memiliki komitmen moral dalam memperjuangkan kesejahteraan serta kecerdasan bangsa.

### 4. Siklus Perencanaan Anggaran Tingkat Satuan Pendidikan

Proses penyusunan anggaran di tingkat sekolah merupakan siklus terstruktur yang mempertemukan perencanaan teknis edukatif dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah yang mengikat. Tahapan ini diwujudkan melalui formulasi rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang disusun secara partisipatif oleh kepala sekolah, tim manajemen, guru, dan komite. Langkah awal dimulai dengan analisis konteks mengenai kondisi riil sarana prasarana serta kebutuhan peningkatan mutu yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Selanjutnya, sekolah melakukan estimasi biaya secara mendetail untuk setiap jaringan kegiatan rutin maupun pengembangan karakter siswa guna menghindari pemborosan anggaran. Draft rancangan kemudian dikonsultasikan bersama orang tua siswa dan dinas pendidikan terkait untuk diverifikasi serta disinkronkan dengan program strategis pemerintah daerah. Setelah mendapatkan pengesahan resmi, dokumen tersebut wajib disosialisasikan secara transparan kepada seluruh warga sekolah sebagai wujud keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas hukum dalam pelaksanaan tahun berjalan.

### 5. Dampak Intervensi Politik terhadap Mutu dan Stabilitas Sekolah

Hubungan antara pembiayaan pendidikan dan intervensi politik anggaran memberikan dampak yang sangat multidimensional terhadap stabilitas dan kualitas pembelajaran di kelas. Sisi positifnya, penguatan alokasi anggaran yang tepat mampu memperluas aksesibilitas sekolah dan mereduksi kesenjangan mutu antar wilayah melalui penyediaan fasilitas teknologi informasi yang modern. Namun, volatilitas politik seperti pergantian kepemimpinan daerah sering kali memicu ketidakpastian pendanaan akibat adanya perubahan program strategis secara mendadak dan tidak konsisten. Praktik politik lokal terkadang mengarahkan bantuan



infrastruktur secara subjektif ke wilayah tertentu demi kepentingan citra politik, sehingga mengabaikan sekolah lain yang lebih membutuhkan. Selain itu, lemahnya pengawasan dalam birokrasi anggaran membuka celah bagi risiko kebocoran dana operasional yang dapat merugikan hak belajar siswa. Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan harus dikelola secara profesional, bebas dari kepentingan pragmatis, serta difokuskan pada penyederhanaan beban administrasi guru agar proses transformasi nilai edukasi dapat berjalan optimal.

### Pembahasan

Analisis mendalam mengenai pembiayaan pendidikan menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya keuangan memegang peranan yang sangat determinan dalam menciptakan ekosistem pembelajaran yang bermutu. Anggaran pendidikan bukan sekadar instrumen akuntansi teknis, melainkan sebuah manifestasi nyata dari prioritas nasional dan arah kebijakan publik suatu negara (Purwaningsih & Asriati, 2024; Rodin et al., 2025; Sumual et al., 2024). Dalam konteks operasional, struktur pembiayaan terbagi menjadi komponen biaya langsung yang menyentuh proses instruksional seperti pengadaan alat peraga, serta biaya tidak langsung yang menampung *opportunity cost* selama masa studi peserta didik. Ketersediaan dana yang memadai memungkinkan pihak institusi sekolah untuk melakukan investasi jangka panjang pada peningkatan kompetensi pedagogik guru serta pemenuhan sarana teknologi informasi. Di Indonesia, komitmen fiskal ini diperkuat melalui kebijakan politik anggaran tahun 2026 yang mengalokasikan dana sebesar 769,09 triliun untuk sektor pendidikan. Angka 769,09 triliun ini mencatatkan rekor tertinggi dalam sejarah fiskal nasional dengan pertumbuhan sebesar 9,8 jika dibandingkan dengan periode tahun anggaran sebelumnya (Romandoni et al., 2024; Sulasmi et al., 2023; Zamhari et al., 2023). Peningkatan alokasi absolut tersebut diarahkan secara strategis untuk memperkuat jaminan mutu serta mendukung perluasan aksesibilitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat (Rifa'i & Moddilani, 2021; Riowati & Yoenanto, 2022; Zamhari et al., 2023).

Proses penyusunan anggaran di tingkat satuan pendidikan mengintegrasikan logika teknokratis sekolah dengan siklus kebijakan makro pemerintah melalui 6 tahapan yang sistematis. Fase ini dimulai dari identifikasi kebutuhan riil berdasarkan standar nasional pendidikan hingga perancangan jaringan kegiatan yang terukur dalam dokumen draf anggaran pendapatan sekolah. Penghitungan biaya satuan per siswa atau *unit cost* menjadi indikator penting untuk memetakan kebutuhan dana operasional rutin tahunan yang bersifat habis pakai. Alokasi dana yang dikelola sekolah bersumber dari 3 pilar utama pendanaan yang mencakup kontribusi pemerintah pusat, swadaya masyarakat, serta peran sektor swasta. Pada struktur belanja personalia, porsi anggaran sering kali terserap sangat besar hingga mencapai rentang antara 60 sampai 70 khusus untuk pemenuhan gaji serta tunjangan profesi guru (Agustyaningrum & Himmi, 2022; Sudarmono et al., 2021). Penyerapan sebesar 60 hingga 70 tersebut di satu sisi menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, namun di sisi lain membatasi ruang fiskal sekolah untuk mengalokasikan pembiayaan pada sektor investasi prasarana fisik seperti renovasi laboratorium dan sanitasi (Effendy et al., 2024; Herawati et al., 2020).

Dinamika pengalokasian dana ini tidak jarang menjadi arena pertarungan kepentingan politik atau *pork-barrel politics* yang dapat mendistorsi kebutuhan objektif institusi pendidikan. Anggota legislatif di tingkat daerah sering kali mengarahkan aliran dana alokasi khusus fisik atau hibah ke wilayah pemilihan mereka demi mengamankan basis suara elektoral. Praktik intervensi politik lokal tersebut memicu terjadinya ketimpangan pendanaan antar sekolah yang tidak didasarkan pada skala prioritas kerusakan fasilitas riil di lapangan. Kebijakan populis seperti pembebasan uang sumbangan pembinaan pendidikan secara drastis mengubah struktur pendapatan mandiri sekolah menjadi bergantung penuh pada kelancaran transfer dana daerah.



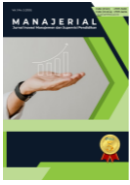
Ketika terjadi pergantian kepemimpinan pasca pemilihan umum, volatilitas politik ini kerap diikuti oleh perombakan regulasi pendanaan secara sepihak yang mengganggu konsistensi perencanaan program jangka panjang sekolah. Ketidakpastian sirkulasi anggaran ini memberikan tekanan tambahan bagi para pengelola sekolah dalam mempertahankan kesinambungan mutu pengajaran yang sedang berjalan di ruang kelas (Harbes et al., 2024; Nurochim & Ngaisah, 2021; Nurrochman et al., 2023; Purwaningsih & Asriati, 2024).

Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal juga membawa dampak multidimensional terhadap pemerataan kualitas sistem pendidikan antardaerah di Indonesia. Daerah dengan kapasitas anggaran pendapatan dan belanja daerah yang kecil sering kali mengalami kesulitan serius dalam menyediakan dana pendamping untuk proyek infrastruktur sekolah. Kondisi sosio geografis yang timpang menyebabkan fasilitas pendidikan di wilayah terpencil semakin tertinggal jauh dibandingkan dengan sekolah di kawasan perkotaan yang kaya sumber daya. Meskipun program bantuan operasional sekolah telah meringankan beban biaya operasional dasar, kebocoran dana pada tingkat birokrasi perantara masih menjadi risiko laten yang menggerogoti efisiensi anggaran. Di samping kendala finansial, guru juga dihadapkan pada beban administrasi yang rumit seperti pengisian berbagai aplikasi pelaporan daring yang menyita waktu mengajar efektif mereka. Evaluasi berkala terhadap mekanisme penyaluran bantuan tunai langsung sangat diperlukan untuk memastikan bahwa sisa ruang fiskal tidak habis terserap untuk kebutuhan birokrasi yang tidak berdampak langsung pada prestasi kognitif siswa (Huriah et al., 2026; Nurrochman et al., 2023; Ratnawati et al., 2026; Sarjito, 2025).

Keterbatasan dalam kajian pembiayaan ini terletak pada fokus analisis yang masih berpusat pada pemetaan dokumen anggaran formal tanpa mengukur indeks efektivitas serapan riil di tingkat kelas. Penelitian ini juga belum menganalisis secara mendalam pengaruh variabel makroekonomi seperti inflasi daerah terhadap daya beli riil satuan pendidikan saat melakukan pengadaan barang jasa. Implikasi praktis dari studi ini menegaskan bahwa untuk mengangkat mutu pendidikan secara nasional, kebijakan anggaran harus dilepaskan dari kepentingan politik elektoral jangka pendek. Fokus pengelolaan keuangan wajib digeser dari sekadar pemenuhan formalitas penyerapan angka 20 menuju penguatan akuntabilitas performa yang berbasis pada hasil belajar siswa. Standardisasi sistem pengawasan digital yang transparan dapat menjadi solusi taktis untuk memperkecil celah korupsi dan memastikan dana transfer tepat sasaran. Dengan kepastian hukum dan stabilitas pendanaan yang konsisten, institusi sekolah akan memiliki ruang gerak yang lebih fleksibel untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka secara optimal dan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen fundamental dalam penyelenggaraan pendidikan yang mencakup seluruh proses pengelolaan dana untuk mendukung kegiatan pembelajaran agar berjalan efektif, efisien, dan berkualitas. Biaya pendidikan meliputi biaya langsung dan tidak langsung, serta memiliki fungsi penting seperti menjamin efisiensi penggunaan dana, keberlanjutan operasional lembaga pendidikan, pengawasan agar terhindar dari penyimpangan, dan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memenuhi kebutuhan komponen pendidikan, serta memperluas kesempatan belajar bagi semua kalangan. Sumber pembiayaan pendidikan di Indonesia berasal dari pemerintah, masyarakat, dan swasta yang saling melengkapi. Pemerintah menjadi sumber utama dengan alokasi minimal 20% dari APBN/APBD yang digunakan untuk berbagai program strategis, sementara masyarakat dan swasta berperan dalam mendukung kebutuhan pendidikan yang belum sepenuhnya terpenuhi.

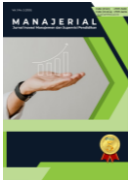


Jenis pembiayaan pendidikan juga beragam, meliputi biaya langsung, tidak langsung, operasional, dan investasi, yang semuanya berkontribusi dalam menunjang keberlangsungan dan pengembangan pendidikan.

Di sisi lain, politik anggaran memiliki peran yang sangat menentukan dalam pembiayaan pendidikan, karena setiap alokasi dana merupakan hasil dari proses politik yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. Anggaran pendidikan tidak hanya mencerminkan kebutuhan teknis, tetapi juga menunjukkan prioritas, kekuasaan, dan arah kebijakan pemerintah. Proses penyusunannya dilakukan secara sistematis melalui tahapan perencanaan hingga pengesahan, dengan melibatkan berbagai pihak untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, terdapat hubungan yang sangat erat antara pembiayaan pendidikan dan politik anggaran. Keputusan politik sangat memengaruhi besaran, distribusi, dan keberlanjutan dana pendidikan. Hal ini dapat memberikan dampak positif seperti peningkatan akses dan mutu pendidikan, namun juga berpotensi menimbulkan ketimpangan dan ketidakstabilan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan anggaran yang adil, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan nyata agar pembiayaan pendidikan benar-benar mampu meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustyaningrum, N., & Himmi, N. (2022). Best practices sistem pendidikan di Finlandia sebagai refleksi sistem pendidikan di Indonesia. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(2), 2100–2109. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2234>
- Effendy, E. N., Putri, R. P. R., Sania, N., & Prihantini, P. (2024). Optimalisasi investasi pendidikan: Menggali konsep dan standar fundamental dalam pembiayaan. *Educatio*, 19(1), 73–82. <https://doi.org/10.29408/edc.v19i1.24861>
- Harbes, B., Karim, H. A., Sesmiarni, Z., Arnedo, M., & Salsabila, S. (2024). Perencanaan pendidikan dan manajemen pembiayaan (Mewujudkan peningkatan mutu secara berkelanjutan). *Al-Marsus: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 128–141. <https://doi.org/10.30983/al-marsus.v2i2.8860>
- Herapati, S., Arafat, Y., & Puspita, Y. (2020). Manajemen pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran. *Attractive: Innovative Education Journal*, 2(3), 21. <https://doi.org/10.51278/aj.v2i3.68>
- Herman, A., & Hayat, M. J. (2021). Management of high secondary education after regional government law. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 1(2). <https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i2.11>
- Himmawan, D., Syaefulloh, S., Sauri, S., & Khoirurrahman, A. (2023). Peran tenaga pendidik dalam transformasi pendidikan menuju generasi emas Indonesia. *Manajia: Journal of Islamic Education Management*, 1(1), 20–30. <https://doi.org/10.58355/manajia.v1i1.3>
- Huriah, H., Rayhanah, S., Erawati, E., Suriansyah, S., & Purwanti, R. (2026). Strategi kepala sekolah dalam mengembangkan profesionalisme guru TK. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(2), 721–733. <https://doi.org/10.51878/learning.v6i2.9681>
- Hutagaol, A. L., Syukri, M., Siahaan, A., & Wardah, S. R. R. (2022). An analysis of national education system policy and social values. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(5), 6497–6504. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i5.3731>
- Lutfi, B. A., Djamhari, E. A., & Fanggidae, V. (2024). *PB 51 – Mendorong optimalisasi*



- anggaran pendidikan untuk pemenuhan hak pendidikan yang merata. Neliti / The Prakarsa. <https://repository.theprakarsa.org/publications/669523/pb-51-mendorong-optimalisasi-anggaran-pendidikan-untuk-pemenuhan-hak-pendidikan>
- Nover, F., Us, K. A., & Shalahudin, S. (2025). Konsep dan praktik manajemen pembiayaan di lembaga pendidikan. *Sultra Educational Journal*, 5(1), 56–64. <https://doi.org/10.44297/seduj.v5i1.842>
- Nurochim, N., & Ngaisah, S. (2021). Kompleksitas model sekolah adaptif di masa pandemi dalam mengelola pembiayaan. *Manajemen Pendidikan*, 16(1), 28–37. <https://doi.org/10.23917/jmp.v16i1.11201>
- Nurrochman, T., Farid, M., Harsono, H., & Suyatmini, S. (2023). Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di sekolah dasar negeri. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 60–70. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i1.331>
- Pujawardani, H. H., Hasan, M., & Saefurridjal, A. (2023). Implikasi paradigma aliran-aliran filsafat terhadap manajemen sumber daya manusia di sekolah. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4(1), 209–224. <https://doi.org/10.15575/jim.v4i1.23810>
- Purwaningsih, D., & Asriati, N. (2024). Pengelolaan keuangan pendidikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya. *Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4(4), 1723–1732. <https://doi.org/10.53299/jppi.v4i4.757>
- Ramadani, R., Hamzah, Y. A., & Mangerengi, A. A. (2021). Indonesia's legal policy during COVID-19 pandemic: Between the right to education and public health. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 6(1), 125–156. <https://doi.org/10.15294/jils.v6i1.43555>
- Ratnawati, E., Kristiyani, N., Azainil, A., Nugroho, D., & Bukari, M. R. (2026). Kepemimpinan digital sebagai penggerak transformasi manajemen sekolah menuju pembelajaran berbasis chromebook di SMP. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 6(1), 419–431. <https://doi.org/10.51878/social.v6i1.9717>
- Rifa'i, A., & Moddilani, G. (2021). Analisis dampak pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap PDB per kapita: Spending more or spending better. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 211–226. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i3.370>
- Riowati, R., & Yoenanto, N. H. (2022). Peran guru penggerak pada merdeka belajar untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. *Journal of Education and Instruction (JOEAI)*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.31539/joeai.v5i1.3393>
- Rodin, R., Endang, E., Hidayah, J., Buwono, H., & Istan, M. (2025). Urgensi penatausahaan anggaran pendidikan. *TADBIR MUWAHHID*, 9(1), 1–34. <https://doi.org/10.30997/jtm.v9i1.16115>
- Romandoni, I. Y., Sulistyorini, S., & Chotimah, C. (2024). Manajemen strategi pembiayaan dalam organisasi sekolah. *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 15–33. <https://doi.org/10.54437/alidaroh.v8i1.1381>
- Sarjito, A. (2025). Evaluation of the efficiency of the Social Welfare Information System-Next Generation (SIKS-NG) in the distribution of social assistance. *Journal of Governance and Public Affairs*, 2(1), 24–61. <https://doi.org/10.22437/1gfkbv97>
- Setiawan, D., Aziz, S. A., & Hilman, C. (2022). Pengembangan social dan pembangunan pendidikan berbasis masyarakat. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(2), 74–84. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v2i2.217>
- Sudarmono, S., Hasibuan, L., & Us, K. A. (2021). Pembiayaan pendidikan. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 2(1), 266–280. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.448>



- Sulasma, E., Prasetya, I., & Rahman, A. A. (2023). Government policy regarding education budget on the posture of the state budget (APBN). *Journal for Lesson and Learning Studies*, 6(1), 142–151. <https://doi.org/10.23887/jlls.v6i1.60171>
- Sumpena, S., Nurhamidah, S., & Hilman, C. (2022). Kebijakan desentralisasi pendidikan dan implementasinya dalam pendidikan di Indonesia. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(2), 41–51. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v2i2.222>
- Sumual, S., Pontoh, S., Kaparang, M., & Kumajas, V. N. (2024). Implementasi planning programming budgeting system dalam manajemen pembiayaan pendidikan. *Journal on Education*, 6(4), 18576–18586. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.5820>
- Suryana, S. I. (2020). Permasalahan mutu pendidikan dalam perspektif pembangunan pendidikan. *Edukasi*, 14(1). <https://doi.org/10.15294/edukasi.v14i1.971>
- Zamhari, Z., Noviani, D., & Zainuddin, Z. (2023). Perkembangan pendidikan di Indonesia. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan Bahasa, Sastra Dan Budaya*, 1(5), 1–10. <https://doi.org/10.61132/morfologi.v1i5.42>